

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dan krusial. Tujuan UMKM menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM yang ada di Indonesia sendiri memiliki kontribusi atau peranan cukup besar dalam perluasan dan penyerapan tenaga kerja baru, terbentuknya Produk Domestik Bruto (PDB) dan jaring pengaman usaha bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru. Jumlah UMKM yang sangat besar telah memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia. UMKM sendiri menjadi pilar penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja dengan angka terbanyak. Namun, rendahnya pemahaman atas konsep dan produk layanan jasa keuangan, menjadikan Sebagian besar UMKM belum mampu mengelola usahanya dengan baik. Sehingga tidak jarang pula UMKM yang

gagal dalam usahanya (Free, 2017). Kegagalan tersebut menyebabkan banyaknya permasalahan yang menghambat kinerja UMKM.

UMKM sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, karena disebabkan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Sehingga, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja UMKM (Muniroh, 2019). Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Abidoun, 2015). UMKM harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan secara efektif dalam menjalankan suatu usahanya, sehingga itu literasi keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha. Menurut Fahmi (2017), literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tersebut dalam rangka membuat keputusan yang efektif. Literasi keuangan menjadi isu yang menarik baik di negara maju maupun negara berkembang dan telah memunculkan perubahan yang cepat dalam industri keuangan (Wachira & Kihui, 2012), Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang mempengaruhi kesejahteraannya (Lusardi, 2009). Literasi keuangan telah terbukti sangat

penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, akurasi dan akuntabilitas yang dihasilkan dalam perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan UMKM bergantung pada kelayakan finansial. Permasalahan yang sering dihadapi dan dialami adalah kurangnya pemahaman literasi keuangan dan inklusi keuangan. Menurut Alamsyah (2015) inklusi keuangan adalah bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.

Center for Financial Inclusion (2013) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, terjadinya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Menurut Survey Nasional Literasi dan Inklusi keuangan tahun 2013, literasi keuangan masyarakat akan diikuti dengan inklusi keuangan masyarakatnya. Masyarakat yang telah mengetahui lembaga jasa keuangan, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan perlu didukung dengan ketersediaan akses kepada lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki korelasi yang erat dalam pemberdayaan konsumen. Korelasi ini memiliki hubungan

yang berbanding lurus atas peningkatan kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menentukan layanan jasa atau produk keuangan.

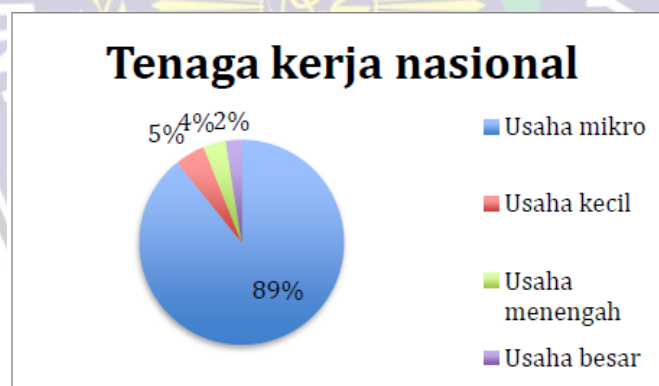
Salah satu hal yang dapat mengatasi berbagai penyebab rendahnya literasi keuangan yaitu dengan inklusi keuangan yang berguna untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan strategi Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017) yang telah memiliki satu pilar tentang edukasi keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan. Inklusi Keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada (Muniroh, 2019). Inklusi keuangan menjadi upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sebagai penyelenggara usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga, UMKM dapat membantu mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kinerja UMKM Kecamatan Balong mengalami adanya ketidak stabilan pendapatan dari tahun ketahun. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM itu sendiri. Berdasarkan hasil survey dari beberapa UMKM yang menjadi penyebab tidak stabilnya kinerja UMKM disebabkan oleh rendahnya tingkat daya beli masyarakat, serta kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pelaku UMKM. Selain itu yang menjadi faktor yang menyebabkan kinerja UMKM meningkat dikarenakan adanya peranan dari lembaga keuangan dengan memberikan

pinjaman terhadap pelaku UMKM guna untuk meningkatkan kinerja UMKM dan juga pertumbuhan dari UMKM yang sedang dijalani. Fenomena yang terjadi terkait kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Balong sebagai hasil wawancara dari sampel responden, menurut Nanik Nur Hidayati sebagai pegawai toko skincare milik salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Balong menyatakan bahwa penerapan sistem laporan keuangan belum terlaksana secara efektif karena laporan keuangan yang dicatat hanya menggunakan catatan manual dan sederhana. Selain itu terdapat keterbatasan dalam mengelola keuangan. Banyak pemilik UMKM di Kecamatan Balong yang masih kurang memperhatikan investasi, tabungan, dan mengasuransikan tempat usahanya. Pemilik UMKM di Kecamatan Balong juga belum memahami literasi serta inklusi keuangan dengan baik khususnya dalam membuat laporan keuangan yaitu dengan menggabungkan antara uang usaha dengan uang pribadi, sehingga usaha mereka belum bisa berkembang dengan baik. Apabila pemilik UMKM dapat memahami dan menerapkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan pada UMKM yang dikelola maka akan mempermudah untuk mengetahui laba atau rugi, mengetahui pendapatan, dan pedoman dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai literasi dan inklusi keuangan secara menyeluruh agar dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM.

Pendapatan UMKM di Kecamatan Balong mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2017 pendapatan UMKM sebesar Rp

18.326.456.500 per tahun, tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 24.529.585.560 per tahun, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 124.395.427.526 per tahun, dan tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 372.862.457.870 per tahun. Hal ini menunjukkan adanya persaingan antar UMKM. Cara menghadapi persaingan dalam usaha untuk memperoleh pendapatan, pemilik UMKM harus ada pendampingan melekat dan terstruktur agar usahanya dapat meningkatkan efisiensi produksi, produktifitas, dan daya. Disisi lain, pelaku UMKM juga perlu membuka diri terhadap kebaruan teknologi, khususnya dalam memanfaatkan berbagai solusi digital yang dapat memperluas pasar sekaligus menekan berbagai biaya produksi.



Gambar 1.1

Tenaga Kerja Nasional

Sumber : UKM Indonesia (2019)

Jumlah unit UMKM pada tahun 2017 memiliki pangsa sekitar 99,99 persen (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar sebanyak 0,01 persen atau sekitar 5.400 unit. Gambar 1.1 menjelaskan bahwa usaha mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga

kerja (89,2 persen), usaha kecil 5,7 juta (4,74 persen), dan usaha menengah 3,73 (3,11 persen) sementara usaha besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, sementara usaha besar hanya menyerap sekitar 3 persen dari total tenaga kerja nasional (Haryanti dan Hidayah, 2019). Hal tersebut berarti terdapat minat yang tinggi dalam mengelola UMKM yang berpotensi dapat menguatkan produktivitas dari UMKM tersebut. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada beberapa sampel penelitian yang meliputi sampel bidang jasa, dagang, dan produksi, menunjukkan bahwa pemilik UMKM lebih memperhatikan target penjualan tetapi kurang memperhatikan pengelolaan keuangan usahanya. Sehingga sering terjadi kekurangan biaya untuk operasional jika ingin menambah produksi yang lebih variatif. Hal tersebut membuat pemilik UMKM terpaksa harus menggunakan uang pribadi untuk biaya produksi, meminjam uang dari lembaga keuangan atau memilih untuk tidak menambah produksi. Kebanyakan dari mereka tidak begitu mengetahui tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Terbukti dengan salah satu jawaban dari responden bahwa mereka tidak berhati-hati dalam pengambilan kredit. Hal ini berarti tingkat literasi keuangan mereka masih sangat rendah. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan membuat mereka sulit untuk dapat mengembangkan usahanya. Di Kecamatan Balong pengelolaan keuangannya juga masih tergolong rendah, hal ini didapatkan dari hasil wawancara beberapa responden sehingga pentingnya pemahaman

mengenai literasi dan inklusi keuangan di Kecamatan Balong sangat dibutuhkan guna meningkatkan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik.

Perkembangan UMKM juga mengharuskan pelaku UMKM untuk siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya. Hal ini agar pelaku UMKM menciptakan usaha baru dan berbeda selain itu UMKM juga diharapkan memiliki kinerja yang bagus. Selain itu pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai inklusi keuangan dan literasi keuangan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi *life skill* yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan jangka panjang serta hal ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja dari UMKM yang sedang dijalani.

Beberapa penelitian mengenai hubungan akses ke keuangan dan manajemen keuangan telah diidentifikasi sebagai faktor yang paling penting dalam menentukan hidup dan pertumbuhan UMKM. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wira Iko Putri Yanti (2019) menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil berbeda ditemukan oleh peneliti Irin Fitria, Fransiska Soejono, M.J. Tyra (2021) bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wira Iko Putri Yanti (2019) juga menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, namun hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Mei Ruli Ninin Hilmawati dan Rohmawati Kusumaningtias (2021) yang

menyatakan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya mengambil objek UMKM di Kabupaten Surabaya sedangkan penelitian ini mengambil objek UMKM di Kecamatan Balong. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Namun Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, menyatakan bahwa tingkat literasi serta inklusi keuangan di Kecamatan Balong masih tergolong rendah. Sehingga, peneliti ingin membuktikan apakah literasi dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM., oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Kecamatan Balong”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan di dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Balong?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Balong?

3. Apakah literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Balong?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Balong.
2. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Balong.
3. Mengetahui pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Balong.

1.3.2 Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan akademisi.

2. Bagi UMKM di Kecamatan Balong

Dapat dijadikan referensi dan kontribusi pemikiran dalam acuan untuk menyempurnakan kinerja yang sesuai dengan kebutuhannya dan untuk strategi optimalisasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja UMKM.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan serta membandingkan teori dan praktik mengenai pentingnya pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi serta bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

